

TUGAS POLICY PAPER

Disusun Oleh:

Nama : Berly Waryanti

Npm : 2526061007

Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Publik

Prodi : Magister Ilmu Administrasi

“Rekomendasi Pembentukan Regulasi SPAB Berbasis KIE sebagai Upaya Penguatan Mitigasi Bencana di Sekolah Kabupaten Lampung Timur”

Executive Summary

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi terhadap berbagai bencana. Hal tersebut tercermin dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami berbagai kejadian bencana dalam lima tahun terakhir terdapat bencana banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan kebakaran hutan yang melanda (IRBI, 2021). Kondisi tersebut menjadikan penguatan mitigasi bencana sebagai kebutuhan penting, khususnya pada sektor pendidikan yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak sekolah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, tercatat sebanyak 56 kejadian bencana terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan dampak terhadap sektor pendidikan sebesar 8 sekolah terdampak.

Sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana melalui pendidikan mitigasi sejak dini. Namun hingga saat ini, implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur, belum terdapat sekolah yang secara resmi menerapkan SPAB.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum adanya kerja sama formal atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPBD Kabupaten Lampung Timur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur terkait implementasi program SPAB di lingkungan sekolah. Akibatnya, kegiatan mitigasi bencana di sekolah masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam kebijakan pendidikan daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan belum tersedianya standar mitigasi sekolah, minimnya simulasi evakuasi, belum terbentuknya tim siaga bencana sekolah, serta rendahnya kapasitas guru dan siswa dalam kesiapsiagaan bencana. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur implementasi SPAB berbasis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Padahal, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 telah mengatur penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana pada sektor pendidikan.

Policy paper ini merekomendasikan pembentukan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati tentang SPAB berbasis KIE sebagai dasar implementasi mitigasi bencana di sekolah. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, dan stakeholder lainnya dalam membangun budaya sadar bencana secara berkelanjutan. Tanpa adanya regulasi daerah yang mengatur implementasi SPAB secara terintegrasi, upaya mitigasi bencana di sekolah berpotensi tetap bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Introduction / Summary of the Problem

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia dan memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Bencana seperti banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran, hingga tsunami sering terjadi dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Menurut BNPB (2022), implementasi SPAB bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap risiko bencana. BNPB mencatat bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dalam kejadian bencana karena tingginya jumlah populasi rentan di lingkungan sekolah.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi. Kondisi geografis wilayah yang luas serta adanya daerah pesisir menyebabkan Kabupaten Lampung Timur rentan terhadap berbagai ancaman bencana, terutama banjir, cuaca ekstrem, dan potensi gempa bumi.

Tabel 1. Data Kejadian Bencana Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Kejadian	Jenis Bencana Dominan	Kecamatan Terdampak
2023	33	Angin puting beliung, banjir, pohon tumbang	12 Kecamatan
2024	45	Angin puting beliung, banjir, kebakaran	10 Kecamatan
2025	56	Angin puting beliung, banjir, orang tenggelam	16 Kecamatan

(Sumber : Data Laporan Bencana BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2025)

Dalam situasi bencana, anak-anak sekolah termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Ketidaksiapan sekolah dalam menghadapi bencana dapat menyebabkan korban jiwa, trauma psikologis, kerusakan sarana pendidikan, dan terganggunya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi berbasis sekolah melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Program SPAB merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekolah melalui penguatan fasilitas aman, tata kelola kebencanaan sekolah, serta pendidikan mitigasi bencana bagi warga sekolah.

Namun hingga saat ini, Kabupaten Lampung Timur belum memiliki sekolah yang menerapkan SPAB secara resmi. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari BPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, kondisi tersebut disebabkan belum adanya kerja sama formal atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPBD Kabupaten Lampung Timur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur terkait implementasi SPAB di lingkungan sekolah.

Analisis Masalah Kebijakan

1. Belum Adanya MoU antara BPBD dan Dinas Pendidikan

Permasalahan utama implementasi SPAB di Kabupaten Lampung Timur adalah belum adanya kerja sama resmi antara BPBD dengan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah.

Ketiadaan kerja sama tersebut menyebabkan:

- a) BPBD belum memiliki dasar koordinasi pelaksanaan program di sekolah;
- b) Sekolah belum memiliki kewajiban menjalankan SPAB;

- c) Belum adanya sekolah percontohan SPAB;
- d) Program mitigasi belum menjadi prioritas pendidikan daerah.

Kegiatan mitigasi yang dilakukan di sekolah selama ini masih berupa sosialisasi kebencanaan dan penyuluhan sesaat. Namun kegiatan tersebut belum didukung oleh sistem mitigasi yang berkelanjutan.

Tabel 2. Kondisi Mitigasi Bencana di Sekolah

Kegiatan Mitigasi	Sudah Ada	Belum Ada
Sosialisasi kebencanaan	√	
Simulasi rutin		√
SOP evakuasi sekolah		√
Tim siaga sekolah		√
Jalur evakuasi		√

Akibat kondisi tersebut, kapasitas guru dan siswa dalam menghadapi bencana masih rendah. Pelaksanaan SPAB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah daerah, PMI, TNI/Polri, dan masyarakat. Namun koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi dan forum koordinasi yang jelas.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka diperlukan kebijakan strategis untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis sekolah di Kabupaten Lampung Timur.

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang SPAB Berbasis KIE
Pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang SPAB berbasis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai dasar hukum implementasi mitigasi bencana di sekolah. Regulasi tersebut dapat memuat: Kewajiban sekolah melaksanakan SPAB, Standar pendidikan kebencanaan, Mekanisme simulasi bencana, Pembentukan tim siaga sekolah, Pembagian tugas antarinstansi.
2. Pembentukan MoU antara BPBD dan Dinas Pendidikan
Kerja sama formal antara BPBD dan Dinas Pendidikan sangat penting untuk:

- a) Memperjelas koordinasi program;
- b) Menentukan peran masing-masing instansi;
- c) Mempermudah pelaksanaan kegiatan di sekolah.

MoU juga menjadi dasar implementasi program SPAB secara berkelanjutan.

3. Integrasi Pendidikan Kebencanaan dalam Sekolah

Materi kebencanaan perlu diintegrasikan dalam: Mata Pelajaran, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Kegiatan ekstrakurikuler, Simulasi kebencanaan rutin. Langkah tersebut bertujuan membangun budaya sadar bencana sejak dini.

4. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan: PMI, TNI/Polri, Perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Relawan kebencanaan. Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam mitigasi bencana.

5. Penyediaan Anggaran Khusus SPAB

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam mendukung: Pelatihan guru, Simulasi bencana, Penyediaan jalur evakuasi, Penyusunan SOP sekolah aman bencana.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur. (2025). *Data Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025*. Lampung Timur: BPBD Kabupaten Lampung Timur.